

Daftar Bacaan

Buku :

- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- HAW. Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1990
- Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya, Arloka, 2002
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009
- B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah, Aksara, Jakarta, 1985
- Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, cet. 2, Djambatan, Bandung, 2004
- Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Syamsudin Haris, Membangun Format Baru Otonomi Daerah, *LIPi* Press dan Obor, Jakarta, 2006
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Grasindo, Jakarta, 2007
- R.G Kartasapoetra, Sistematka Hukum Tata Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002
- Djohermansyah Djohan, Problematic Pemerintahan dan Politik Lokal, cetak I, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Pratikno, “Desentralisasi Pilihan Yang Tidak Pernah Final” dalam buku “Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia”, Editor Abdul Gaffar Karim, cetak III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2004

Syaukani HR, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, cetak 12, Gunung Agung, Jakarta, 1998

Mashuri Maschab, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Akuari, Jakarta, 1999

Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995

Ridwan HR, Hukum Administrasi

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987

Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1992

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab,” Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Andi Hamzah, “Kamus Hukum”, Ghalia Indonesia, 2005

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

<http://palembang.bpk.go.id/files/2009/11/DITAMA-BINBANGKUM-Asas-Dekonsentrasi-dan-Asas-Tugas-Pembantuan-Dalam-Penyelenggaraan-Pemerintahan.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2019, Pukul 01.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010,

Anis Zakaria Kama, *Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2012

Nisjar S. Karhi, "Beberapa catatan Tentang Good Governance", Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 1997

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 / PMK.01/2015 tentang tata cara penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas dan penunjukan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Surat edaran nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian yang di terbitkan oleh Badan Kepegawaian Nasional.